

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Di dalam UU No. 5 Tahun 1979 salah satu fungsi dari Kepala Desa adalah Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat, dalam membangun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebab pembangunan yang dilakukan di daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh masyarakat.²

Ketika membahas kepemimpinan, tidak terlepas dari masalah pemimpin, konsep kepemimpinan, dan mekanisme pemilihan pemimpin. Sebelum membicarakan lebih jauh soal kepemimpinan, ada baiknya dilakukan peninjauan terlebih dahulu definisi konsep pemimpin. Pendefinisian ini dapat membantu untuk memahami dan melakukan pembahasan menurut alur yang sistematis.

¹ Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta, Balai Aksara, 1986), cet ke-V, h. 30-31

² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, *Tentang Pemerintahan Desa*, Pasal 10 Ayat 1

Banyak definisi tentang pemimpin baik itu menurut ahli politik, ekonomi, sosial, antropologi (budaya) maupun agama. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan.³

Dalam pengertian ini Soerjono Soekanto, menghubungkan kepemimpinan (*leadership*) dengan kemampuan seseorang sebagai pemimpin (*leader*) untuk mempengaruhi orang lain (anggotanya), sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinannya⁴. Wahyusumijo, lebih melihat kepemimpinan sebagai suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan⁵.

Menurut al-Mawardi, yang dimaksud seorang imam atau pemimpin adalah apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan .⁶ Keadilan harus dipegang pemimpin, hal ini disebabkan pemimpin sebagaimana yang dikenal dalam Islam adalah seorang Khalifah yang mengatur ummat sebagai

³ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali 1994 : 181).

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h.60

⁵ Wahyusumijo, *Kepemimpinan dan Motivasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1984), h. 60

⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 276 (pen), cet ke-IV

pengganti Rasulullah Saw. Dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu⁷. Menurut al-Zamakhsari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya⁸.

Melihat kemajemukan masyarakat Indonesia, maka tantangannya adalah bagaimana cara mengembangkan pluralisme dalam konteks membangun kepemimpinan dan kedaulatan bangsa. Fungsi kepemimpinan adalah sebagai *ulil amri* dan *khadimul ummah*, artinya amanah jabatan dan kekuasaan harus digunakan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, berlaku adil, dan melindungi kepentingan masyarakat.⁹

Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas, jangan sampai kepentingan umat Islam mengakibatkan negara lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang yang menguasai aparatur negara. Sementara mereka yang berusaha menyuarakan ide-ide demokrasi, pluralisme, dan perlindungan hak-hak asasi manusia cenderung dituding tidak memiliki nasionalisme. Mengingat daerah pedesaan merupakan wilayah yang menjadi dasar setiap pembangunan, maka kreativitas dan ide-ide yang cemerlang, harus dimiliki oleh seorang kepala desa, sebab dengan adanya program dan ide-ide yang baik, pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan berjalan dengan baik dan maksimal.

⁷ Yusuf Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Islam*, Terjemahan Kathur Suhardi, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1999), cet. Ke-1, h. 50

⁸ Abd Muis Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada), cet. Ke-III, h. 223

⁹Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1993), h. 45

Merujuk pada pendapat Geoffrey G. Meredith, Kartini Kartono menjelaskan bahwa kakualitas pemimpin dapat diukur dengan memperhatikan sejumlah hal berikut: (1) yakinkan bahwa dirinya seorang pemimpin, (2) banyak orang yang mencari bapak untuk minta dipimpin atau bertanya, (3) kembangkan dan terapkan ide-ide baru, (4) mainkan peranan aktif dalam kehidupan masyarakat, (5) tingkatkan kekuasaan dan hilangkan kelemahan, (6) tingkatkan program dan rencana tentang kepemimpinan, (7) belajarlah dari kesalahan terdahulu, (8) berorientasilah kepada hasil dan selesaikan sesuatu yang telah dimulai, (9) gunakan kekuatan sebagai pemimpin untuk membantu orang lain, (10) yakinkan orang lain tentang kemampuan, (11) dengarkan masukan, saran, dan nasihat atau kritik sekalipun, dan (12) lakukan perubahan ke arah kemajuan.¹⁰

Untuk menghasilkan hal di atas, seorang pemimpin diharapkan mampu membina hubungan yang baik dengan rakyatnya, agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan berhubungan dengan pengelolaan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan¹¹. Keberhasilan seorang pemimpin juga dapat ditentukan dari bentuk kerja sama dalam pembangunan yang tidak hanya untuk anggotanya, namun dari masyarakat untuk masyarakat. Pembangunan di sini dapat diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹² Masyarakat tidak dapat bergerak tanpa adanya pemimpin sebagai *mediator* dan *motivator*

¹⁰ Kartini Kartono, *Opcit*, h. 18-21

¹¹ *Ibid*, h. 31

¹² Sondang siagian, *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 99.

serta *komunikator* dalam pembangunan di berbagai bidang. Pemimpin harus dapat menjalankan ketiga fungsi itu dalam kelompoknya.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan *patron-cilent* (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin¹³. Hubungan antara pemimpin dan anggotanya seringkali bertolak dari kebutuhan anggotanya¹⁴. Dalam kedudukan sosial, seorang pemimpin berperan mengontrol dan mengawasi serta menggerakkan segala aktivitas dalam masyarakatnya. Pemimpin yang baik akan dianggap oleh anggotanya sebagai cermin, guru, dan tokoh kunci (*key person*) dalam pembangunan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kadus III yaitu Bapak Bahari ia mengatakan bahwa memang di Desa Muara Jalai, upaya pemberdayaan yang dilakukan belum seutuhnya menyentuh masyarakat, sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab kepala desa kurang menjalin komunikasi dengan masyarakat dan program yang dilakukan kurang menyentuh masyarakat serta kegiatan yang dilakukan jarang

¹³ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*. (Jakarta: Balai Pustaka 1981), h.191.

¹⁴ Keit R Legg, *Tuan Hamba dan Politisi*. (Jakarta: Sinar Harapan 1983),h. 21

melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasa sangat tidak diperdulikan.¹⁵ Sedangkan menurut Bapak Nurzal selaku Kadus II, beliau mengatakan, kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan disebabkan kepala desa jarang bermusyawarah dengan masyarakat dan sering mengambil keputusan sendiri, dan sifat kepemimpinan yang otoriter, jadi kalau ada pembangunan masyarakat enggan terjun dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Seharusnya kepala desa itu bermusyawarah dulu dengan masyarakat baru terjadilah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan kepala desa, dan apapun yang direncanakan desa pasti akan terlaksana dengan baik¹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya seorang pemimpin dalam masyarakat, sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan aparat setempat, baik aparat desa maupun tokoh masyarakat sehingga program kerja yang di susun dapat terlaksana dengan baik. Dan wewenangnya sebagai kepala desa dalam menjalankan pemerintahan berjalan dengan lancar.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Disamping itu kepala desa mengemban fungsinya antara lain :

1. Menggerakkan partisipasi masyarakat
2. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
3. Melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya

¹⁵ Bapak Bahari, Kadus III, *Wawancara,I*, Tanggal, 08 Oktober 2013

¹⁶Bapak Nurzal, kadus II, *Wawancara*, Tanggal 08 Oktober 2013

4. Keamanan dan ketertiban masyarakatnya
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah di atasnya¹⁷.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka bagi seorang Kepala Desa harus memiliki gaya tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri. Keikutsertaan masyarakat Desa Muara Jalai dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas yang diemban seorang pemimpin cukup berat dibandingkan dengan kemampuan yang dimilikinya, baik dari kemampuannya memimpin, cara dia memimpin serta bagaimana pendekatannya kepada masyarakat, maka dari itu harus diberikan penyempurnaan agar tercapai tujuan itu sendiri. Serangkaian dengan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul :

“Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Study Perspektif Figh Siyasah (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)”

B. Batasan Masalah

¹⁷Aw Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-III, h. 23.

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan dan faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah dalam Memberdayakan Masyarakat oleh seorang Kepala Desa?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat. Sebagai bahan informasi bagi pihak desa dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah dalam Memberdayakan Masyarakat oleh seorang Kepala Desa

- d. Untuk mengembangkan dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah
- e. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN SUSKA RIAU

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar adalah berawal ketika penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di daerah tersebut. Sehubungan dengan itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, pimpinan informal yang diambil dari Kadus yang berjumlah III Dusun. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Study Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Desa Muara Jalai)

3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Muara Jalai yang berjumlah lebih kurang 3094 orang, yang kepala keluarga 734

orang. Karena populasi penelitian ini lebih dari 100, maka penulis menggunakan random sampling yakni sampel penelitian ini di ambil 10% dari jumlah populasi yang ada yakni 309 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan kepala keluarga.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari pencatatan, baik dari Kantor Camat, Kantor Kepala Desa serta pemimpin informal yang diambil dari pemimpin Kadus dan lembaga-lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku penunjang penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan, khususnya dalam masalah kepemimpinan Kepala Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
- b. Wawancara, yaitu wawancara diarahkan kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan kepala keluarga.

- c. Angket, yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden secara tertulis yang terdiri dari masyarakat Desa Muara Jalai

F. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggunakan kaedah-kaedah umum yaitu ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan cara mengemukakan fakta-fakta yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti kemudian fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa.

G. Sistematika penulisan

BAB I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan tinjauan lokasi penelitian yang menguraikan Letak Geografis, Sejarah Singkat, jumlah penduduk, agama, pendidikan dan mata pencaharian Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab, Kampar.

BAB III: Kerangka teoretis, Pengertian Kepemimpinan, bentuk pola kepemimpinan, Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat, Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV: Pembahasan, tinjauan Figh Siyasah tentang pola kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat, faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dan tinjauan Siyasah dalam Memberdayakan Masyarakat oleh seorang Kepala Desa.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran